

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2011, gelombang protes “*The Arab Spring*” terjadi di berbagai negara di Timur Tengah, yaitu Tunisia, Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya, dan yang paling kompleks dan berkelanjutan adalah di Suriah.¹ Protes yang terjadi di Suriah terjadi akibat penolakan masyarakat Suriah terhadap kepemimpinan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad.² Demonstrasi yang terjadi kemudian berkembang menjadi sebuah perang sipil yang mengakibatkan setidaknya 511.000 orang meninggal dunia dan lebih dari 12 juta masyarakat Suriah menjadi pengungsi di seluruh dunia.³

Kekacauan yang terjadi di Suriah tersebut mendukung kemunculan sebuah organisasi yang dideklarasikan sebagai *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). ISIS dikategorikan oleh Amerika Serikat (AS) sebagai sebuah organisasi terorisme.⁴ ISIS berdiri pada 29 Juni 2014 di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi dan mendeklarasikan diri sebagai sebuah kekhalifahan dengan ibukota Raqqa di Suriah.⁵ Setelah kemunculannya, ISIS terus memperluas wilayahnya secara pesat

¹ Abdul Qadir Mushtaq dan Muhammad Afzal, “Arab Spring: Its Causes and Consequences,” *Journal of the Punjab University Historical Society* 30, no.1 (2017): 1, diakses 28 November, 2020, http://pu.edu.pk/home/journal/40/V_30_No_1_Jun_2017.html

² “International Security in a Changing World: The Syria Civil War,” Stanford University Bulletin Explore Courses, 2019-2020, diakses 28 November, 2020, <https://explorecourses.stanford.edu/>

³ “Syria: Events of 2018,” Human Rights Watch, Juni 29, 2018, diakses 28 November, 2020, <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/syria>

⁴ Bureau of Counterterrorism, “Foreign Terrorist Organizations,” Website U.S. Department of State, 2019, diakses 28 November, 2020, <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/>

⁵ Willem Theo Oosterveld dan Willem Bloem, *The Rise and Fall of ISIS: From Evitability to Inevitability Volatility and Friction in the Age of Disintermediation* (Netherlands: The Hague Centre for Strategic Studies, 2017), 7, diakses 28 November, 2020

hingga ke Kota Mosul di Irak dan juga berhasil mendekat menuju Baghdad dan Wilayah Kurdistan.⁶

Pergerakan ISIS yang sangat pesat ini mengancam kepentingan AS di kawasan Timur Tengah. Setelah Perang Dunia II, AS berusaha menjaga kestabilan kawasan yang memiliki sumber daya geopolitik maupun geoekonomi yang peseperti Timur Tengah. Menurut Ali Khedery, Duta Besar AS untuk Irak tahun 2003-2009, AS memiliki aset investasi dari perusahaan minyak dan kantor konsulat jenderal di Kota Erbil, Irak, yang terancam akibat pergerakan ISIS.⁷ Selain itu, AS memiliki kepentingan dalam upaya kontra-terorisme di kawasan tersebut.⁸ Kepentingan tersebut yang kemudian mendorong AS terlibat dalam permasalahan melawan ISIS di kawasan Timur Tengah.

Pada Oktober 2014, Presiden AS Barack Obama memerintahkan Kementerian Pertahanan AS untuk memprakarsai sebuah koalisi operasi militer yang dinamakan *Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve* (CJTF-OIR). CJTF-OIR merupakan koalisi militer yang terdiri dari 70 negara dan bekerjasama dengan Partai Kurdi Suriah atau *Partiya Yekîtiya Demokrat* (PYD) dan milisinya yaitu *People Protection Unit's* atau *Yekîneyên Parastina Gel* (YPG) sebagai pasukan lokal. Kerjasama yang dijalin diantaranya berupa persediaan persenjataan, pelatihan strategi dan taktik perang, serangan udara dan bantuan

⁶ Fawas A. Gerges, *ISIS: A History* (New Jersey: Princeton University Press, 2016), 1, diakses 28 November, 2020, <https://doi.org/10.2307/j.ctvc77bfb>

⁷ Ali Khedery, "Frontline: The Rise of ISIS," wawancara oleh Martin Smith, Oktober 28, 2014, video: 45:15, PBS. Org, diakses 28 November, 2020

⁸ Hal Brands, "Why America Can't Quit the Middle East," Hoover Institution, Maret 21, 2019, diakses 28 November, 2020, <https://www.hoover.org/research/why-america-cant-quit-middle-east>

militer lainnya.⁹ Pembentukan koalisi ini juga dibarengi dengan peningkatan jumlah pasukan AS sebanyak 2.000 personel di Suriah.¹⁰

Kebijakan AS bekerjasama dengan PYD menimbulkan gesekan antara AS dengan Turki. Gesekan tersebut terjadi dikarenakan PYD dipercayai oleh Turki merupakan bagian dari *Kurdistan Workers Party* (PKK), yaitu sebuah organisasi yang melakukan pemberontakan di Turki sehingga diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Turki dan bahkan AS.¹¹ Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh AS mengancam keamanan Turki dikarenakan AS sudah memperkuat kelompok teroris yang mengancam keamanan nasional Turki.¹² Meskipun demikian kerjasama antara AS dan YPG tetap berlanjut.

Pada tahun 2017, masa kepemimpinan Presiden Barack Obama berakhir dan kemudian digantikan oleh Presiden Donald John Trump. Selama masa kampanye, Presiden Donald Trump berjanji akan menghentikan peperangan yang terjadi di Timur Tengah dan menarik pasukan militer Amerika Serikat dari wilayah

⁹ Office of Inspector General U.S Department of State, *Operation Inherent Resolve*, Lead Inspector General Report to the United State Congress, United States, 2020, diakses 30 Maret, 2020, <https://media.defense.gov/>

¹⁰ Jim Garamone, "Pentagon Announces Troop Levels in Irak, Syria," U.S Dept of Defense, 6 Desember, 2017, diakses 25 November, 2020, <https://www.defense.gov/>

¹¹ US Department of State, "Foreign Terrorist Organizations," Bureau of Counterterrorism, diakses 30 November, 2020, <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/>

¹² Daily Sabah, "*Western allies act as shields for terrorist groups, Erdogan say*," Daily Sabah, 28 November, 2018, diakses November 30, 2020, <https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2018/11/28/western-allies-act-as-shields-for-terrorist-groups-erdogan-says>

tersebut.¹³ Meskipun demikian, Presiden Donald Trump masih melanjutkan operasi militer yang diinisiasi pada masa Presiden Barack Obama di Suriah.¹⁴

Pada 19 Desember 2018, Presiden Donald J. Trump pertama kali mengumumkan bahwa AS akan menarik pasukannya dari wilayah Utara Suriah. Keputusan ini diumumkan melalui Twitter Presiden Trump, dimana ia menyatakan bahwa ISIS sudah dikalahkan dan dia akan menarik pasukan Amerika Serikat dari wilayah tersebut.¹⁵ Namun keputusan tersebut ditunda pelaksanaannya hingga 6 Oktober 2019, dimana penarikan pasukan ini memberikan jalan bagi operasi militer Turki terhadap etnis Kurdi yaitu “*Operation Peace Spring*” pada 9 Oktober 2019.¹⁶ Operasi tersebut bertujuan untuk memukul mundur pasukan PYD dari perbatasan Turki dan menciptakan sebuah zona aman sepanjang 20 mil pada wilayah perbatasan antara Turki dan Suriah.¹⁷

Pernyataan Presiden Donald Trump mengenai kekalahan ISIS bertolak belakang dengan laporan yang dikeluarkan oleh Pentagon yang menyatakan bahwa ISIS masih melakukan upaya untuk memperkuat kekuatannya di Suriah. Kondisi tersebut didukung oleh kurangnya pemantauan yang dilakukan terhadap kamp tahanan ISIS dan penampungan pengungsi di Al-Hol yang memungkinkan ideologi

¹³ BBC, “*U.S election 2020: Has Trump delivered on his promises?*,” BBC News Website, 15 Oktober, 2020, diakses November 2020, <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-37982000>

¹⁴ Donald J. Trump, “Remarks at the Central Intelligence Agency in Langley, Virginia,” The American Presidency Project, Januari 21, 2017, diakses 6 Desember, 2020, <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/>

¹⁵ Donald J. Trump, “Twitter,” @realDonaldTrump twitter, Desember 19, 2020, diakses 28 Oktober 28, 2020, <https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075528854402256896>

¹⁶ “Timeline: US intervention in Syria’s war since 2011,” Al Jazeera News Website, Oktober 7, 2019, diakses Oktober 28, 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2019/10/7/timeline-us-intervention-in-syrias-war-since-2011>

¹⁷ Sarah El Deeb, “US Commander: Partnership with Kurds against IS Still Strong,” The Associated Press News, November 15, 2019, diakses November 30, 2020, <https://apnews.com/2a0292ecea745be990f217b8cf654b3>

ISIS menjadi mudah untuk menyebar. Selain itu, banyak tahanan ISIS yang sudah diamankan Pasukan PYD kabur di tengah serangan Turki ke perbatasan Suriah dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap tahanan tersebut. Fakta-fakta tersebut memberikan indikasi bahwa pasukan ISIS masih memiliki kekuatan di Suriah.¹⁸

Keputusan ini juga menimbulkan berbagai reaksi. Dari pemerintahan AS, *US Special Presidential Envoy for the Global Coalition to Counter ISIL*, Brett McGurk dan Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis mengajukan pengunduran diri sebagai bentuk protes terhadap penerapan kebijakan penarikan tersebut. Protes tersebut juga terjadi akibat pengambilan keputusan yang tidak melibatkan diskusi dengan petinggi pemerintahan AS.¹⁹ Berdasarkan survei yang dilakukan USA Today/Ipsos Poll kepada penduduk AS yang mengikuti dan memahami isu keterlibatan AS di Suriah, 58% responden menyatakan tidak setuju dengan kebijakan penarikan pasukan dari Suriah dan 76% responden menyatakan bahwa AS memiliki kewajiban untuk melindungi Pasukan Kurdi.²⁰

Juru bicara Pasukan YPG, Kino Gabriel, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh AS merupakan pengkhianatan atas komitmen AS dalam menjaga keamanan kawasan konflik tersebut dan kerjasama dalam melawan ISIS.²¹ Keputusan ini menurut ahli juga akan memberikan dampak buruk pada citra AS

¹⁸ Office of Inspector General U.S Department of State, *Operation Inherent Resolve*, Lead Inspector General Report to the United State Congress (United States, 2020-10) diakses 30 Maret, 2020, <https://media.defense.gov/>

¹⁹ Martin Pengelly, "US anti-Isis envoy Brett McGurk quits over Trump Syria withdrawal," *The Guardian*, 22 Desember, 2018, diakses 30 November, 2020, <https://www.theguardian.com/us-news/2018/dec/22/us-anti-isis-envoy-brett-mcgurk-quits-trump-syria-withdrawal>

²⁰ Mallory Newall dan Chris Jackson, "Most Americans Familiar with Syria Troop Withdrawal Believe it is the Wrong Decision," Ipsos Survei, 18 Oktober, 2019, diakses 30 Oktober, 2020, <https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/syria-troop-withdrawal>

²¹ "Turkey-Syria border: Kurds bitter as US troops withdraw," *BBC News*, 7 Oktober, 2019, diakses 28 Oktober, 2020, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49960973>

terhadap sekutunya, dimana AS dalam kondisi ini sudah mengkhianati sekutunya sendiri yaitu Etnis Kurdi. Selain itu, kebijakan AS untuk meninggalkan Suriah akan memberikan keleluasaan bagi pengaruh Rusia dan Iran untuk mencapai kepentingan nasional mereka di kawasan tersebut tanpa adanya hambatan dari AS.²²

1.2 Rumusan Masalah

Kemunculan dan berkembangnya ISIS di Suriah sebagai akibat kekacauan perang saudara yang terjadi, menyebabkan AS mengeluarkan kebijakan untuk terlibat di kawasan tersebut dalam sebuah misi anti-terorisme melawan ISIS. Operasi tersebut *Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve* (CJTF-OIR) yang merupakan koalisi militer yang terdiri dari 70 negara dan melibatkan pasukan lokal Suriah dalam operasinya. Pasukan lokal yang bekerjasama dengan koalisi ini adalah Partai Kurdi Suriah (PYD). Kerjasama ini menimbulkan gesekan antara Pemerintah AS dan Turki, meskipun demikian kerjasama tetap dilanjutkan. Namun, setelah adanya pergantian rezim ke Presiden Donald Trump, AS memutuskan untuk menarik pasukannya dari posisi yang dikuasai oleh PYD di perbatasan Suriah dengan Turki dan membuka jalan bagi *Operation Peace Spring* Turki yang berupa serangan militer terhadap PYD. Meskipun data-data menunjukkan bahwa misi CJTF-OIR untuk menumpas ISIS masih belum selesai. Kebijakan ini menimbulkan kecaman dari berbagai pihak akibat dari tindakan AS yang mengkhianati kerjasamanya dengan PYD. Selain itu, kebijakan tersebut juga

²² Wojciech Michnik dan Spyridon Plakoudas, "The US Withdrawal and the Scramble for Syria," *Journal European, Middle Eastern and African Affairs*, 2020: 34-36

menyebabkan munculnya kebangkitan basis militer dari ISIS dan bebasnya pengaruh dari Rusia dan Iran di kawasan Suriah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai: “Faktor apa yang mendorong kebijakan AS untuk menarik pasukan militer dari Suriah?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong kebijakan luar negeri AS untuk menarik pasukan militer dari wilayah Suriah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri AS di Suriah.
2. Sebagai referensi untuk keilmuan mengenai kebijakan AS di Timur Tengah khususnya di kawasan Suriah.

1.6 Studi Pustaka

Untuk menganalisis perubahan kebijakan AS di Suriah tersebut, diperlukan informasi–informasi yang relevan dan bisa dijadikan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini. Artikel pertama yaitu oleh Nathaniel Barton yang berjudul “*To Arm*

or Not to Arm the Kurds: a Look as U.S. National Security Interest in Kurdistan".²³

Artikel ini menjelaskan mengenai hubungan antara Etnis Kurdi di dalam kebijakan luar negeri AS. Artikel ini menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh hubungan yang dijalin AS dengan YPG dalam misi melawan ISIS. Artikel ini menjelaskan bagaimana Etnis Kurdi sebagai etnis terbesar keempat di dunia yang masih belum memiliki negara. Kondisi mereka tersebut membuat mereka sering dilibatkan berkali-kali dalam kepentingan politik negara sekitar mereka dan oleh kekuatan global.

Artikel ini menjelaskan bahwa kegiatan AS dalam mempersenjatai YPG dalam melawan ISIS akan memberikan dampak yang buruk pada kepentingan AS terutama terkait hubungannya dengan Pemerintah Turki. AS diperkirakan sudah mengeluarkan sebanyak US\$ 2,2 miliar dalam bentuk persenjataan kepada kelompok YPG untuk mempersenjatai mereka dalam upaya melawan ISIS. Tindakan AS mempersenjatai YPG tersebut akan mencederai hubungan antara AS dengan sekutunya terutama dengan Turki. Hal ini dikarenakan keterkaitan antara YPG dan PKK yang dianggap sebagai organisasi terorisme di Turki.

Artikel ini memberikan pengetahuan pada penulis mengenai hubungan antara AS dengan Etnis Kurdi dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kerjasama antara AS dengan YPG tersebut. Pengetahuan ini tentu akan bermanfaat dalam memberikan penulis apa saja yang memberikan input pada perubahan kebijakan luar negeri AS.

²³ Nathaniel Barton, "To Arm or Not to Arm the Kurds: A Look as U.S. National Security Interests in Kurdistan," *Pepperdine Policy Review* 10, no.6 (2018), 14

Studi pustaka yang kedua yaitu artikel yang ditulis oleh Simonas Dapkus, dengan judul “*Turkey’s Security Dilemma on the Border with Syria: Situation Assessment and Perspectives of the Intervention*”.²⁴ Artikel ini berbicara mengenai kepentingan Turki terhadap perbatasannya dengan Suriah dengan kemunculan ISIS dan kegiatan terorisme yang dilakukan oleh gerakan PKK.

Artikel ini menjelaskan kepentingan yang ingin dicapai Pemerintah Turki dalam melakukan intervensi ke perbatasannya dengan Suriah adalah untuk melawan ancaman ISIS dan mengganggu konsolidasi wilayah Etnis Kurdi di Suriah yang diduga terkait erat dengan PKK. Tidak hanya ancaman keamanan, Turki juga ingin menyelesaikan permasalahan imigran Suriah yang mengungsi ke Turki dikarenakan konflik yang terjadi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah Turki berkeinginan untuk menciptakan sebuah *safe zone* di perbatasan Turki dengan Suriah. Artikel ini menjelaskan mengenai dilema yang dihadapi oleh Turki untuk melakukan intervensi yang disebabkan oleh hukum internasional dan posisi yang diambil oleh AS dalam konflik tersebut.

Artikel ini memberikan pandangan kepada penulis mengenai apa yang diincar oleh Turki dalam melakukan serangan kepada Etnis Kurdi atau dalam hal ini YPG yang dimana merupakan topik yang ingin diteliti penulis. Artikel ini juga memberikan penjelasan bahwa kebijakan AS untuk mundur dari Suriah merupakan hal yang sudah lama ditunggu oleh Turki dan bagaimana posisi yang dimiliki oleh AS pada saat pembuatan kebijakan terkait Suriah.

²⁴ Simonas Dapkus, “Turkey’s Security Dilemma on the Border with Syria: Situation Assessment and Perspectives of the Intervention,” *Lithuanian Foreign Policy Review* 33, no. 1 (2015): 48-63, diakses 28 Oktober, 2020, DOI:10.1515/lfpr-2016-0009

Artikel ketiga yang menjadi studi kepustakaan penulis adalah Artikel dari Indri Susilo, Rizqi Apriani Putri, Nur Azizah dengan judul “*Intervensi AS melawan Negara Islam Irak Suriah/NIIS (ISIS/the Islamic State of Iraq and Syiria)*”.

²⁵Artikel ini berbicara mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh AS dalam melakukan intervensi terhadap tindakan terorisme oleh ISIS. Artikel ini menjelaskan upaya yang dilakukan AS menggunakan konsep intervensi.

Artikel ini menjelaskan bahwa dalam upaya AS memerangi ISIS, AS menggunakan dua metode yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh AS adalah melakukan pembentukan koalisi internasional, serangan udara, pengerahan pasukan militer, dan juga bekerjasama dengan organisasi YPG dan PKK. Upaya represif yang dilakukan oleh AS adalah mengalokasikan dana sebesar US\$1,2 miliar setiap tahunnya dalam bentuk persenjataan dan bantuan kemanusiaan dan juga sebesar US\$350 juta untuk mempersenjatai militer YPG.

Artikel ini memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai kebijakan yang sudah dilakukan oleh AS dalam menangkal ISIS sebelum diumumkannya kebijakan penarikan pasukan militer. Pengetahuan ini akan membantu penulis dalam menganalisis penyebab perubahan kebijakan luar negeri AS.

Studi kepustakaan keempat adalah artikel dari Peerzada Tufail Ahmad, yang berjudul “*U.S-Turkey Relationship and Syrian Crisis*”.²⁶ Artikel ini berbicara

²⁵ Indri Susilo, Rizqi Apriani Putri dan Nur Azizah, “Intervensi AS melawan Negara Islam Irak Suriah/NIIS (ISIS/the Islamic State of Iraq and Suriah),” *Indonesian Journal of International Relations* 2, no.1 (2018)58-67, DOI: <https://doi.org/10.32787/ijir.v2i1.20>

²⁶ Peerzada Tufail Ahmad, “U.S.-Turkey Relationship and Syrian Crisis,” *Alternatives Turkish Journal of International Relations* 14, no.4 (2015): 11

mengenai hubungan yang terjalin antara AS dan Turki dalam konflik yang terjadi di Suriah. Penulis membahas hubungan antara kedua negara berdasarkan kepentingan yang dimiliki oleh keduanya.

Artikel ini berbicara mengenai adanya persimpangan yang terjadi dalam hubungan A.S dengan Turki yang disebabkan perbedaan fokus dalam konflik Suriah. Turki berfokus untuk mengatasi permasalahan PKK dan mengalahkan Rezim Suriah. Pemerintah AS memiliki fokus yang berbeda yaitu untuk mengatasi ancaman ISIS. Selain itu, AS juga memiliki kebijakan anti ISIS dengan memberikan bantuan ke PYD yang merupakan ancaman bagi Pemerintahan Turki karena keterkaitan mereka dengan PKK (organisasi teroris di Turki). Artikel ini menjelaskan bahwa Turki merupakan sekutu paling strategis bagi AS dalam upaya melawan ISIS dikarenakan posisi mereka yang strategis dan posisi Turki yang sudah menjadi sekutu di NATO

Artikel ini memberikan gambaran dan pengetahuan kepada penulis mengenai bagaimana posisi Turki dalam hubungannya dengan AS. Pengetahuan ini tentu akan berguna bagi penulis untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh Turki dalam perubahan kebijakan yang dilakukan oleh AS.

Artikel kelima yang menjadi sumber kepustakaan penulis adalah “*The US Withdrawal and the Scramble for Syria*” oleh Dr. Wojciech Michnik dan Dr. Spyridon Plakoudas.²⁷ Artikel ini menganalisis mengenai dampak dari keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump untuk menarik mundur pasukannya

²⁷ Wojciech Michnik dan Spyridon Plakoudas, “The US Withdrawal and the Scramble for Syria,” *Journal European, Middle Eastern and African Affairs*, 2020: 34-36

dari Suriah dan membuka jalan bagi operasi militer Turki terhadap Etnis Kurdi terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Suriah.

Artikel ini menjelaskan bagaimana Turki menganggap Etnis Kurdi di kawasan Suriah sebagai sebuah ancaman hingga bahkan sempat beberapa kali melakukan serangan kecil hingga bekerjasama dengan Rusia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh AS merupakan sebuah kebijakan yang sudah diprediksi sebelumnya. Namun, bagaimana kebijakan tersebut diterapkan telah menciptakan permasalahan baru yaitu invasi yang dilakukan Turki. Selain itu Artikel ini juga menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh aktor-aktor yang terlibat di konflik tersebut. Rusia memiliki keuntungan terbesar dikarenakan konflik yang terjadi antara AS, Turki, dan Kurdi memberikan kesempatan bagi Rusia untuk menanamkan pengaruhnya di Timur Tengah. Artikel ini menjelaskan bahwa keputusan tersebut menyebabkan AS mengalami kerugian diantaranya, gagal menahan pengaruh Iran di Suriah dan kilang minyak di Deir ez-Zor untuk mencegah kemunculan kembali ISIS. Kerugian lainnya yang didapat oleh AS yaitu rusaknya citra AS sebagai sekutu bagi negara lain.

Perbedaan penelitian yang akan peneliti tulis dibandingkan dengan studi pustaka yang telah dijabarkan di atas adalah studi pustaka pertama hanya membahas hubungan antara AS dan Etnis Kurdi khususnya PYD secara umum, sedangkan penulis akan membahas mengenai kebijakan AS untuk menarik pasukan dari Suriah. Artikel kedua juga hanya membahas mengenai kepentingan yang dimiliki oleh Turki di perbatasan tersebut dan hanya menjelaskan dampak dari kebijakan AS untuk menarik pasukannya dari Suriah. Studi pustaka ketiga membahas mengenai upaya yang telah dilakukan oleh AS dalam upayanya untuk melawan

ISIS, sedangkan skripsi penulis akan membahas mengenai penghentian upaya tersebut. Studi pustaka keempat hanya membahas hubungan yang terjalin antara Turki dan AS. Studi kepustakaan kelima memiliki kemiripan dengan apa yang ingin penulis teliti, namun, artikel ini tidak menggunakan konsep ilmu hubungan internasional dalam analisis terhadap isu tersebut.

1.7 Kerangka konseptual

1.7.1 Konsep Foreign Policy Determining Factor

Kebijakan luar negeri menurut Weber dan Smith merupakan kebijakan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan nilai yang diinginkan oleh negara dalam berhubungan dengan lingkungan eksternal sekaligus untuk mengatur interaksi masyarakat negaranya dengan pihak luar.²⁸ Sedangkan menurut Rosenau, kebijakan luar negeri merupakan tindakan yang diambil oleh negara untuk mempertahankan dan merubah kepentingan nasional di sistem internasional.²⁹ Menurut Kegley dan Wittkopf, kebijakan luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh otoritas di pemerintahan yang berisi nilai dan instrumen yang dibutuhkan untuk mencapai kepentingan nasional.³⁰ Berdasarkan argumen tersebut bisa dipahami bahwa kebijakan luar negeri merupakan kebijakan yang terkandung di dalamnya nilai, mekanisme, dan aturan yang dimiliki oleh negara untuk

²⁸ Mark Webber dan Michael Smith, *Foreign Policy in a Transformed World* (London: Prentice Hall, 2002), diakses 28 Oktober, 2020, <https://doi.org/10.4324/9781315847269>

²⁹ Vinsensio Dugis, "Analysing Foreign Policy," *Artikel Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik* 20, no. 2 (2007): 41-42, diakses 30 Oktober, 2020

³⁰ Kegley Charles W. Jr dan Wittkopf Eugene R, *World Politics: Trend and Transformation*, 6th ed. (New York: St. Martin's Press, 2001), 55

mencapai kepentingannya di lingkungan internasional dan mengatur interaksi yang terjadi dalam lingkup masyarakatnya.

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan AS untuk menarik mundur pasukan militer dari Suriah, penulis menggunakan konsep “*Factors Determining Foreign Policy*” oleh Prof. Dr. Tarık OĞUZLU dalam buku yang berjudul *Foreign Policy Analysis*.³¹ Tarık menyatakan dalam buku ini bahwa upaya untuk memahami kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara terus menerus mengalami perkembangan setiap saat dengan berbagai perspektif yang berbeda-beda. Perspektif realisme klasik, liberalisme plural, realisme struktural dan berbagai perspektif lainnya memiliki pendapat berbeda dalam memahami terbentuknya kebijakan luar negeri. Perbedaan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa negara memiliki dua strategi dalam bertahan di sistem internasional, yaitu negara bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki maupun bisa menjalin kerjasama dengan negara lainnya. Selain itu, muncul juga pandangan yang menyatakan bahwa institusi, pejabat dalam negeri, sifat dari pemerintahan juga memberikan dampak dalam pembuatan kebijakan.

Prof. Dr. Tarık OĞUZLU dalam bukunya berusaha untuk memberikan penjelasan bahwa terdapat tiga faktor yang menentukan sebuah kebijakan luar negeri yaitu, faktor individual, internal dan eksternal.³²

1. Faktor Individual

³¹ Prof. Dr. Tarık OĞUZLU, “Foreign Policy Analysis,” *Anadolu University, Eskişehir, Republic of Turkey*, (2018): 77-91

³² Prof. Dr. Tarık OĞUZLU, 2018.

Banyak ahli yang memandang bahwa seorang pemimpin dari suatu negara mewakili sikap yang dianut oleh negara tersebut terkait suatu isu. Pandangan terkait faktor individu didominasi oleh pemikiran *Rational Actor Model* dan *cognitive school of thought*. *Rational Actor Model* memberikan asumsi bahwa seorang pemimpin akan bersikap rasional dalam berhubungan dengan sistem internasional.³³ Pemimpin suatu negara akan melakukan analisis terkait *cost-benefit* dari sebuah kebijakan yang akan diambil oleh suatu negara secara rasional dan akan memilih kebijakan yang memberikan keuntungan terbesar dengan pengorbanan sumber daya paling sedikit. Pemimpin dianggap akan memiliki pengetahuan yang cukup dan pertimbangan yang baik untuk mengambil keputusan terbaik yang dibutuhkan oleh negara.

Pemikiran *cognitive school of thought* berusaha untuk melengkapi argumen dari *Rational Actor Model*. Pemikiran ini berpendapat bahwa ada faktor-faktor yang akan menghalangi rasionalitas dari seorang pemimpin.³⁴ Faktor-faktor tersebut diantaranya tingkat pendidikan, pengetahuan mengenai isu yang dibahas, dan karakteristik individu (emosi, pengalaman, sistem kepercayaan, pandangan terhadap dunia internasional, ideologi, dan ciri individu lainnya). Selain faktor yang bersifat personal dari individu seorang pemimpin, ada beberapa faktor yang juga bisa mempengaruhi seorang pemimpin.

Pengaruh lingkungan yang berdiskusi dengan pemimpin yang membuat kebijakan luar negeri. Pengaruh dari kelompok diskusi yang berada disekitar

³³ Laura Neack, *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era*, 2nd ed. (Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, 2008), 31-39

³⁴ Laura Neack, 2008.

pemimpin dari suatu negara bisa memberikan masukan maupun tekanan dalam rasionalitas pemimpin. Tekanan tersebut bisa diberikan dari perbedaan pengetahuan, pengalaman dalam birokrasi pemerintahan, posisi dalam partai atau perbedaan lainnya yang dimiliki oleh pemimpin dengan penasehat dan orang disekelilingnya yang juga membahas isu tersebut.

Faktor lainnya yaitu kecenderungan untuk mengambil referensi dari sejarah untuk menanggapi suatu isu. Kecenderungan dari seorang pemimpin untuk meniru penyelesaian yang sudah dilakukan sebelumnya terhadap permasalahan yang dianggap mirip dengan isu yang dihadapi. Sebuah permasalahan dianggap merupakan sesuatu yang berulang sehingga dianggap bisa diselesaikan dengan mengikuti penyelesaian masalah sebelumnya.

Faktor berikutnya adalah kecenderungan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh negaranya merupakan hal yang baik dan yang dilakukan oleh negara lain salah dan tidak tepat. Tindakan ini disebut "*attribution bias*". Seorang pemimpin akan beranggapan bahwa kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh negara merupakan sesuatu yang baik dan bertujuan untuk kebaikan negara. Sementara dampak maupun tindakan yang bersifat negatif dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasional negara seringkali dikaitkan dengan pihak lain

Faktor lainnya adalah "*cognitive dissonance*", dimana seorang pemimpin memiliki pandangan tertentu terhadap dunia dan kepercayaan sendiri yang akan membentuk pendekatannya terhadap kebijakan luar negeri. Seorang pemimpin akan memiliki kecenderungan untuk mengabaikan kondisi eksternal yang tidak sesuai dengan prinsip yang dipegangnya. Kondisi psikologis ini juga menyebabkan

seorang pemimpin untuk mengartikan kondisi eksternal sesuai dengan kepercayaan atau pandangan pribadi yang dimilikinya.

2. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri diantaranya adalah sifat dari rezim politik suatu negara, konseptualisasi peran negara oleh elit yang berkuasa, budaya strategis, ideologi politik suatu negara, agama, kelompok kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan opini publik suatu negara.³⁵ Faktor dimana apakah sebuah negara menganut sistem demokratis ataupun sistem otoriter akan menentukan kepentingan yang ingin dicapai negara tersebut yang tentu akan mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dikeluarkan. Nilai tersebut juga akan mempengaruhi hubungan negara tersebut dengan negara lainnya. Ideologi juga menentukan bagaimana sebuah negara mempromosikan negaranya dalam berhubungan dengan negara lain dan proses pengambilan kebijakan yang dianut oleh suatu negara.

Konseptualisasi dari peran nasional negara mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara. Hal ini dimana pemimpin sebuah negara menentukan visi dan misi negaranya dan bagaimana peran yang dilakoni oleh negara dalam berhubungan dengan negara lain. Konseptualisasi peran negara tersebut juga dibarengi terhadap visi geografis dan geopolitik negara, bagaimana respon sebuah negara terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan internasional,

³⁵ Breuning Marijke, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 115-140

dan bagaimana negara menempatkan dirinya di dunia internasional sesuai dengan dengan kepribadian yang dimiliki oleh suatu negara.

Kelompok kepentingan, kelompok lobi, organisasi masyarakat dan media juga merupakan faktor penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Namun, kontribusi dari kelompok ini hanya akan ada pada rezim yang menghargai kebebasan berpendapat. Kelompok kepentingan, kelompok lobi, organisasi masyarakat akan mampu melaksanakan audiensi dengan pemerintah apabila memiliki kebebasan untuk bergerak. Media juga memiliki peran untuk mempengaruhi opini publik dan bisa memberikan dorongan kepada pembuat keputusan.

3. Faktor Eksternal

Pada faktor eksternal, beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara diantaranya adalah dinamika sistem lingkungan internasional, pendistribusian kapasitas material diantara negara, lokasi negara secara geografis, kebijakan luar negeri negara lain, dan kondisi dari wilayah suatu negara.³⁶ Dinamika sistem dari dunia internasional adalah bentuk polarisasi dari sistem internasional tempat sebuah negara berada. Apakah dalam sebuah lingkungan internasional terjadi bentuk polarisasi unipolar, bipolar, ataupun multipolar. Polarisasi tersebut akan ditanggapi oleh negara sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara yang tentu akan mempengaruhi strategi yang dianut negara.

³⁶ Mustafa Aydın, "Determinants of Turkish Foreign Policy: Historical Framework and Traditional Inputs," *Middle Eastern Studies* 35, no.4 (1999): 152-186

Distribusi kekuatan juga memainkan peran penting dalam kebijakan yang dianut oleh negara. Negara dengan kekuatan super, menengah, maupun kecil akan memiliki strategi yang berbeda dalam mengambil kebijakan yang akan dianut oleh suatu negara. Kondisi kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara akan menentukan seberapa dampak yang diberikan oleh suatu negara dalam sistem internasional tempat negara tersebut berada.

Letak geografis suatu negara juga memainkan peran dalam penentuan kebijakan luar negeri suatu negara. Beberapa poin yang diperhatikan dalam letak geografis suatu negara yaitu jumlah negara tetangga dari negara tersebut, kekuatan maritim dan darat yang dimiliki suatu negara, dan ciri khas khusus dan strategi yang dimiliki secara geografis yang dimiliki oleh suatu negara yang menempatkan negara tersebut memiliki nilai lebih tersendiri dibandingkan negara lain. Letak geografis dan kondisi medan yang dimiliki negara juga akan memberikan pengaruh terhadap strategi militer yang dianut oleh suatu negara.

Selain itu, kebijakan luar negeri yang dianut oleh negara lain dalam suatu lingkungan internasional akan memberikan dampak bagi kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan yang dikeluarkan oleh negara lain akan mengundang respon dari negara lain untuk mengimbangi kebijakan tersebut. Tendensi dari kebijakan negara lain yang bersifat revisionis maupun menjaga status quo akan mengundang respon yang berbeda dari negara lain.

Konsep ini digunakan oleh penulis melihat konsep ini memberikan penulis untuk melihat secara lebih jelas mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara melalui berbagai aspek diantaranya individu, internal, dan

eksternal. Konsep ini memiliki keunggulan dimana untuk menganalisa kebijakan luar negeri tidak hanya terbatas dari faktor dalam negeri melainkan juga dari pemimpin negara tersebut sekaligus pengaruh dari luar negeri. Sehingga penulis memutuskan untuk menganalisa dengan menggunakan konsep ini.

1.8 Metode penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang menjelaskan pengaruh yang diberikan satu variabel terhadap variabel penelitian lainnya.³⁷ Pendekatan metode kualitatif dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data-data berupa dokumen, berita, buku, laporan resmi, video, tulisan ilmiah dan data relevan lainnya yang akan membantu penulis dalam mendapatkan kesimpulan terkait isu yang penulis teliti. Jenis penelitian ini digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan AS untuk menarik pasukannya dari Suriah.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang digunakan untuk menganalisis faktor yang mendorong kebijakan AS untuk menarik pasukannya dari kawasan Suriah adalah pada tahun 2017-2019. Tahun 2017 merupakan masa Presiden Donald J. Trump

³⁷ Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya," *Artikel Studi Komunikasi dan Media* 15, no. 1 (2011), 129

terpilih menjadi Presiden AS Serikat dan tahun 2019 merupakan saat pelaksanaan kebijakan untuk menarik pasukan dari Suriah dikeluarkan oleh AS.

1.8.3 Tingkat Analisis

Dalam melakukan penelitian, penulis akan menentukan tingkat analisis dari penelitian ini. Untuk menentukan tingkat analisis, penulis perlu terlebih dahulu menentukan unit analisis dan unit eksplanasi dari penelitian ini. Unit analisis merupakan unit yang akan dianalisis perilakunya yang juga dikenal sebagai variabel dependen. Unit eksplanasi adalah unit yang mempengaruhi unit analisis yang akan diamati atau dikenal sebagai variabel independen.³⁸ Unit analisis dari penelitian ini adalah kebijakan penarikan pasukan AS, dan unit eksplanasi dari penelitian ini adalah dinamika konflik Suriah.

Level analisis dari sebuah penelitian menurut Mochtar memiliki tiga level analisis untuk menjelaskan kebijakan aktor negara. Tiga level tersebut yaitu individu, negara, dan sistem internasional.³⁹ Penelitian ini berada pada level analisis negara dengan melakukan analisis terhadap tindakan yang dilakukan oleh negara yaitu AS dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri di Suriah.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini ditulis oleh penulis dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan menggunakan sumber-sumber terkait. Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang bersifat sekunder. Data yang

³⁸ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), 39

³⁹ Mohtar Mas' oed, 1990.

digunakan oleh penulis adalah laporan pelaksanaan operasi militer melawan ISIS yang diperoleh penulis melalui halaman web Pentagon. penulis juga menggunakan hasil wawancara aktor terkait dengan media berita maupun dalam konferensi pers resmi, pidato maupun pernyataan dari pihak-pihak terkait di AS, Pihak Kurdi dan juga Pihak Turki. Selain itu penulis juga melihat *National Security Strategy* AS yang diunduh melalui situs *White House*, laporan yang dikeluarkan oleh *Congressional Research Service* digunakan oleh penulis sebagai data dalam melakukan penelitian.

Penulis juga akan menggunakan sumber tertulis yang berasal dari buku-buku, artikel, dokumen, majalah serta artikel ilmiah yang penulis dapatkan dari berbagai sumber seperti J-Stor, Sagepub, Palgrave, Researchgate, dan Google Scholars dan sumber berita yang berasal dari media seperti CNN, BCC, dan Al-Jazeera dengan menggunakan beberapa kata kunci seperti, “US withdrawing of Syria”, “Intervention”, “United States”, “Syria”, “ISIS”, “Turkey and Kurds”, dan “Syrian Kurds”. Selain itu, penulis juga menggunakan data survei yang dikumpulkan oleh PewResearch sebagai sumber data dalam penulisan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan proses menemukan dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui catatan lapangan, dokumentasi, penjabaran unit-unit, melakukan sitesa, menemukan pola, dan memilah hal-hal penting untuk menemukan kesimpulan.⁴⁰ Pada penelitian ini, penulis

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006) 17-18

menggunakan konsep untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi AS dalam mengeluarkan kebijakan untuk menarik pasukan militer dari Suriah. Untuk melakukan analisis terhadap isu terkait, penulis terlebih dahulu menjelaskan dan menjabarkan fakta terkait operasi militer CJTF-OIR dan bagaimana proses keluarnya AS dan penghentian dari operasi tersebut, dengan kata lain penarikan pasukan militer AS dari Suriah yang menimbulkan berbagai implikasi. Fakta ini merupakan langkah awal yang menunjukkan urgensi dari permasalahan ini.

Selanjutnya, penulis akan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh AS untuk menarik pasukannya dari Suriah. Penulis menggunakan konsep “*Factors Determining Foreign Policy*” oleh Prof. Dr. Tarik OĞUZLU untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis. Penulis melakukan analisis terhadap informasi-informasi yang ditemukan oleh penulis sesuai dengan tiga aspek yang dikemukakan oleh Tarik.

Aspek analisis pertama adalah faktor individu, dimana pada aspek ini penulis melakukan analisis terhadap aktor Presiden Donald J. Trump sebagai Presiden ke-45 AS yang memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan luar negeri AS. Penulis melakukan analisis terhadap faktor individu dengan menggunakan aspek pengaruh kelompok diskusi penasehat presiden Donald Trump, pengaruh referensi kebijakan pemerintahan AS sebelumnya, pengaruh *attribution bias* Presiden Donald Trump, dan pengaruh *cognitive Dissonance* Presiden Donald Trump. Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap faktor internal yang berasal dari Pemerintahan AS sendiri. Aspek yang digunakan oleh penulis adalah pengaruh bentuk rezim politik AS, pengaruh konseptualisasi peran

negara AS dan pengaruh media massa dan opini publik. Faktor terakhir yang penulis analisis adalah pengaruh dari pengaruh eksternal, yang merupakan pengaruh yang berasal dari luar negeri AS. Aspek-aspek yang dianalisis diantaranya yaitu pengaruh dinamika sistem internasional dan pengaruh kondisi geografis.

Penulis melakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut menggunakan data yang diperoleh dari pidato, wawancara, penelitian sebelumnya, maupun dokumen-dokumen penting dari pemerintah AS. Penulis menghubungkan data yang penulis temukan dengan indikator-indikator yang ditemukan di dalam konsep dan mengambil kesimpulan apakah faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap terbuatnya kebijakan.

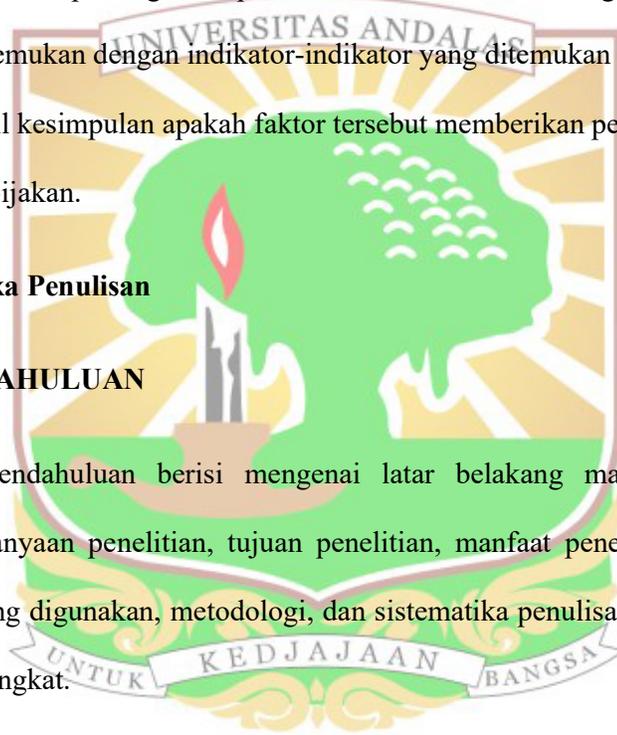
1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang digunakan, metodologi, dan sistematika penulisan dari penelitian yang penulis angkat.

BAB II PELAKSANAAN OPERASI COMBINED JOINT TASK FORCE- OPERATION INHERENT RESOLVE (CJTF-OIR)

Pada bab peneliti ingin menjelaskan dinamika yang terjadi pada operasi CJTF-OIR yang diprakarsai oleh AS di Suriah. Dinamika ini terkait dengan bentuk operasi dan hubungan yang terjadi dengan negara dan sekutu yang terlibat dengan AS pada pelaksanaan operasi.



BAB III KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS MENARIK PASUKAN MILITER DARI SURIAH

Pada bab ini peneliti menjelaskan kebijakan luar negeri AS menarik pasukan dari Suriah. Bab ini akan menjelaskan proses pengambilan keputusan dan kepentingan nasional AS terkait dengan penarikan pasukan tersebut. Selain itu bab ini juga akan menjelaskan konsekuensi dari kebijakan tersebut.

BAB IV FAKTOR YANG MENDORONG KEBIJAKAN AS UNTUK MENARIK PASUKAN DARI KAWASAN SURIAH DI TENGAH KONFRONTASI ANTARA TURKI DAN ETNIS KURDI

Pada bab ini penulis akan menghubungkan kebijakan AS menarik pasukan militer dari Suriah pada tahun 2018 dengan kerangka konseptual “*Factors Determining Foreign Policy*” oleh Prof.Dr. Tarık OĞUZLU. Bab ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan AS untuk menarik pasukan dari Suriah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari jawaban penelitian dan saran dari peneliti yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait agar mampu mendapatkan tambahan referensi dalam mengambil kebijakan.

